



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER
DAYA HUTAN**

Nomor : SK. 36/IPSDH/TU/PLA.1/12/2020

Tentang

**RENCANA KERJA (REVISI) DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2020**

DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2020 serta penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020;
 - b. bahwa pada tahun 2020 berjalan, Direktorat IPSDH telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan covid-19 dan penambahan pagu anggaran sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja (Revisi) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 melalui Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL//SETDIT/KEU.0/9//2020 tentang Rencana Strategis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.14/PKTL//SET.2/KEU.1/12//2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL//SETDIT/KEU.0/12//2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
8. Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor SK.21/IPSDH/TU/PLA.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TENTANG RENCANA KERJA (REVISI) DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2020

Pasal 1

Rencana Kerja (Revisi) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan rencana kerja yang telah mengalami perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid- 19 dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 2

Rencana Kerja (Revisi) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman

dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN
PEMANTAUAN SUMBER DAYA
HUTAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Belinda Arunarwati Margono', with a long horizontal stroke extending to the right.

BELINDA ARUNARWATI MARGONO
NIP. 19681101 199303 2 003

Lampiran

Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Nomor : SK. 36/IPSDH/TU/PLA.1/12/2020

Tanggal : 21 Desember 2020

TENTANG

RENCANA KERJA (REVISI)
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Revisi) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 merupakan revisi dari Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 yang sudah disusun sebelumnya. Rencana Kerja (Revisi) ini disusun sebagai penyesuaian terhadap perubahan kondisi akibat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan kebijakan dalam semua bidang dan adanya penambahan anggaran dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Rencana Kerja (Revisi) ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020.

Rencana Kerja (Revisi) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, dan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Semoga Rencana Kerja (Revisi) Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan baik guna mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024.

Jakarta, 21 Desember 2020

Direktur



Belinda Arunarwati Margono
NIP.196811011993032003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	2
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019.....	6
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019.....	6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019.....	13
BAB III RENCANA KERJA 2020.....	11
BAB IV PENUTUP.....	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Berdasarkan Golongan.....	4
Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 3. Pencapaian Sasaran Kegiatan Dit. IPSDH Tahun 2018.....	6
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Kegiatan Dit. IPSDH Tahun 2019.....	7
Tabel 5. Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran Lingkup Dit. IPSDH Tahun 2018.....	10
Tabel 6. Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran Lingkup Dit. IPSDH Tahun 2019.....	10
Tabel 7. Dukungan Dit. IPSDH dalam Program Ditjen PKTL Tahun 2020 (Perubahan).....	13
Tabel 8. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan Dan Elemen Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020.....	13
Tabel 9. Rincian Biaya per Unit Indikator.....	15

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	4
Gambar 2.	Prioritas Nasional Pembangunan Nasional.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis tahun 2020-2024, tahun 2020 adalah tahun pertama dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 yang dapat menjadi penentu awal keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan periode 2020-2024. Sejalan dengan arah dan kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dit IPSDH merupakan Prioritas Bidang yang mendukung Prioritas Nasional.

Sebagai bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020. Rencana Kerja ini disusun dengan menjabarkan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara lebih rinci dalam kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020. Penjabaran program Ditjen PKTL ke dalam kegiatan dan unit kegiatan dengan menjaga kesinambungan sasaran kegiatan dan indicator kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga untuk mendukung terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran yang efektif. Dokumen Rencana kerja disusun sesuai alokasi pagu anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berkedudukan sebagai Unit

Eselon II dibawah Eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
3. koordinasi dan sinkronisasi kebijakandi bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
6. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan membawahi 4 (empat) Subdirektorat dan 1 Sub Bagian, yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi Hutan

Subdirektorat Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Sub Direktorat Inventarisasi Hutan membawahi dua seksi, yaitu:

- a. Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang

inventarisasi hutan tingkat nasional.

- b. Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

2. Subdirektorat Pemantauan Sumberdaya Hutan

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumberdaya Hutan membawahi dua seksi, yaitu:

- a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.
- b. Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan

3. Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan.

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan membawahi 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan tematik kehutanan.
- b. Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang dokumentasi tematik kehutanan.

4. Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

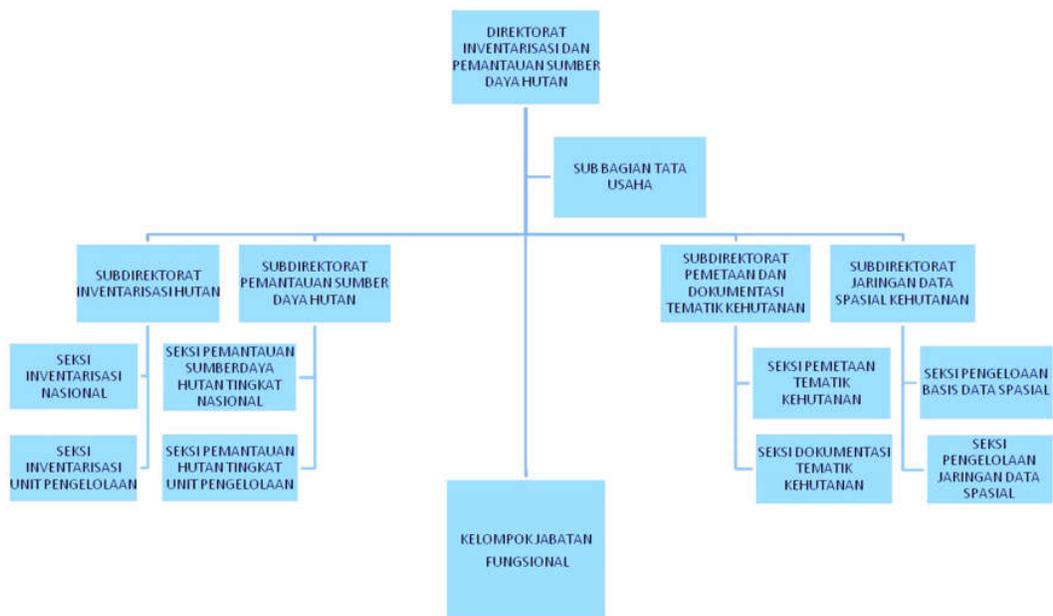
Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan membawahi 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Struktur organisasi secara lebih jelas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebanyak 63 orang, terdiri atas 52 orang PNS dan 11 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai

berdasarkan golongan dan tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	<i>Golongan IV</i>	11
2	<i>Golongan III</i>	37
3	<i>Golongan II</i>	4
4	<i>Golongan I</i>	-
5	<i>Tenaga Kontrak</i>	11
	JUMLAH	63

Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	
1	<i>Direktur</i>	1					1
2	<i>Sub Direktorat Inventarisasi Hutan</i>	1	3	1		1	6
3	<i>Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	2	2	5		2	11
4	<i>Sub Direktorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan</i>		2			2	4
5	<i>Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan</i>	1	3	1		3	8
6	<i>Sub Bagian Tata Usaha</i>			3		3	6
7	<i>Fungsional Tertentu</i>		4	6	4	2	16
8	<i>Tenaga Kontrak</i>		1	7		3	11
	Jumlah	5	15	23	4	16	63

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

A. *Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019*

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran kegiatan tahun 2018 dan 2019, telah dilakukan beberapa kegiatan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai dengan Indikator Kinerja kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menjadi tolok ukur untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Tabel 3. Pencapaian Sasaran Kegiatan Dit. IPSDH Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target 2018	Capaian 2018	%
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100 KPH	100
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi	100
Terlaksananya Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk pencapaian Target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Data Citra Resolusi Tinggi untuk Pencapaian Target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	33 Provinsi	33 Provinsi	100
Dukungan Manajemen Kegiatan IPSDH	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1 Layanan	100

Prognosis tahun 2019 adalah perkiraan capaian target tahun 2019. Pada Rencana Kerja (Revisi) ini, prognosis tersebut sudah merupakan capaian final, bukan sebagai perkiraan. Capaian tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Kegiatan Dit. IPSDH Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Indikator Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Data dan Informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Data dan Peta SDH mendukung Pengalokasian KH	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	100
		Data dan Informasi Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	600 KPH	600 KPH	100
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	Data dan Informasi Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	100
		Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Dukungan Manajemen Kegiatan IPSDH	Layanan perkantoran	Operasional dan pemeliharaan kantor	12 Bulan/Layanan	12 Bulan/Layanan
Layanan Internal organisasi		Pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) Kegiatan IPSDH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Rata-Rata Capaian					100

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut

1. Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH

Data dan informasi potensi sumber daya hutan nasional merupakan hasil dari kegiatan inventarisasi hutan nasional melalui kegiatan enumerasi dan re-enumerasi plot klaster TSP/PSP seluruh Indonesia dimana pada tahun 2019 dapat dilaksanakan pada 182 klaster. Hasil kegiatan inventarisasi hutan digunakan sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan dan penyusunan sistem informasi kehutanan.

Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang yang dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan sudah dilakukan secara tahunan. Saat ini telah tersedia data Citra Satelit Resolusi Tinggi/Sangat Tinggi (CSRT) yang telah mendukung pemantauan SDH sehingga dapat meningkatkan akurasi data penutupan lahan. Data CSRT juga mendukung pemantauan penutupan lahan lingkup Unit Pengelolaan di Kawasan Hutan. Data penutupan lahan yang dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra satelit juga digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan penghitungan emisi GRK sektor lahan, luas kebakaran hutan dan lahan, serta mendukung pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan dan lingkungan lainnya. Saat ini data dan informasi sumber daya hutan telah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan.

2. Jumlah KPH yang memiliki data dan potensi sumber daya hutan

Data dan Informasi Potensi yang disusun pada tahun 2018 terdiri dari 100 KPH dengan rincian 82 KPHK, 10 KPHL dan 8 KPHP yang meliputi gambaran umum KPH, wilayah pengelolaan dan potensi dari KPH. Sedangkan pada tahun 2019 disusun data dan informasi dari 614 KPH (termasuk update dari data KPH sebelumnya) dengan rincian 342 KPHP, 188 KPHL dan 84 KPHK. Penyediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan KPH diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi pada KPH yang diintegrasikan dengan penafsiran penginderaan jauh dari citra satelit resolusi sedang dan tinggi/sangat tinggi serta menggunakan data sekunder lainnya.

3. Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)

Laporan deforestasi merupakan salah satu yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pemetaan sumberdaya hutan. Penyediaan data deforestasi sangat tergantung pada proses penafsiran penutupan lahan, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi penutupan lahan, rapat pembahasan

dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 tentang JIGN, bertanggung jawab terhadap ketersediaan data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai implementasi Perpres No. 27 tahun 2014 tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Direktorat IPSDH bertugas sebagai Unit Kliring JIG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) yang berasal dari Produsen Data (Walidata), serta penyebarluasan DG dan IG kepada pengguna. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 61 IGT dan 33 walidata yang secara berkala wajib memproduksi dan memutakhirkan data geospasial yang menjadi tanggungjawabnya kepada unit kliring.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018, realisasi penyerapan DIPA Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebesar Rp9.389.595.121,- atau 96,88% dari total pagu sebesar Rp9.691.605.000,-.

Realisasi anggaran sebesar Rp9.389.595.121,- terdiri dari belanja barang sebesar Rp7.018.252.770,- dan belanja modal sebesar Rp2.371.342.351,-. Anggaran yang tersedia di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan bersumber dari Rupiah Murni (RM).

Tabel 5. Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran Lingkup Dit. IPSDH Tahun 2018

Komponen Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
<i>Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH</i>	1.456.300.000	1.418.257.300	97,39
<i>Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan</i>	233.800.000	228.417.825	97,70
<i>Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)</i>	1.763.400.000	1.728.243.236	98,01
<i>Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)</i>	4.819.580.000	4.718.450.668	97,90
<i>Layanan Perkantoran</i>	1.163.525.000	1.045.997.544	89,90
<i>Layanan Internal Organisasi</i>	255.000.000	250.228.548	98,13
TOTAL	9.691.605.000	9.384.266.644	96,88

Pada tahun 2019, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memperoleh pagu sebesar Rp4.630.325.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Prognosis realisasi anggaran sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp4.578.757.248,- atau 98,89% dari pagu anggaran. Capaian anggaran tersebut sudah merupakan capaian akhir.

Tabel 6. Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran Lingkup Dit. IPSDH Tahun 2019

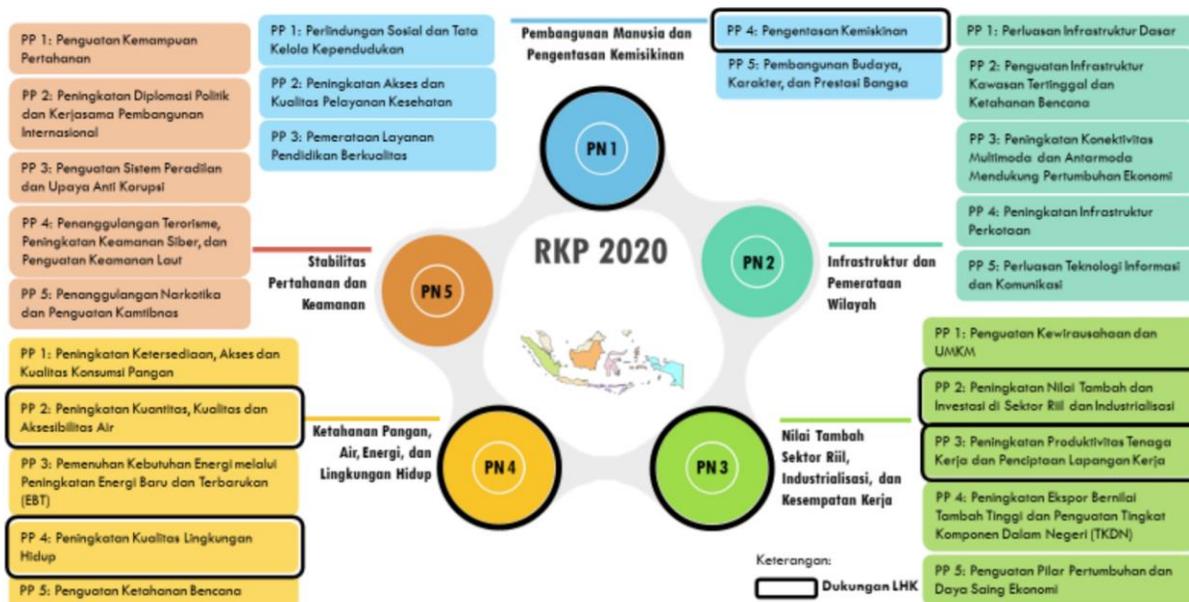
Komponen Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
<i>Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH</i>	1.829.832.000	1.818.118.052	99,35
<i>Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan</i>	257.200.000	253.536.800	98,57
<i>Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)</i>	1.379.768.000	1.361.929.637	98,70
<i>Layanan Perkantoran</i>	1.163.525.000	1.145.172.759	98,42
Total	4.630.325.000	4.578.757.248	98,89

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Tahun 2020, merupakan tahun peralihan dari RPJMN Tahun 2015-2019 dan penjabaran pertama dari RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, telah menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Prioritas Nasional tersebut dijelaskan pada Gambar berikut.



Gambar 2. Prioritas Nasional Pembangunan Nasional

Posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional yaitu: 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian prioritas nasional **Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan** dan **Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup**.

Sesuai dengan RKP Tahun 2020, arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan yang dimulai dengan memberikan

kejelasan status hukum (legal) sebuah kawasan hutan sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Keputusan MK No. 45/2011, meningkatkan kualitas dan akses/keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak diantaranya melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan hingga tingkat unit pengelola (KPH) serta memastikan pembagian peran regulator dan pelaksana (operator) dalam pengelolaan kawasan hutan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dimana keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 akan menjadi pembuka jalan bagi pencapaian target kumulatif lima tahun sesuai RPJMN tahun 2020-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Program Planologi dan Tata Lingkungan ditetapkan dengan sasaran dan indikator program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2020, penyesuaian terhadap Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dan perubahan anggaran DIPA tahun 2020.

Sesuai dengan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024, tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- 2) Program Kualitas Lingkungan Hidup
- 3) Program Dukungan Manajemen.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai salah satu Direktorat di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut berperan dalam program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan kegiatan prioritas bidang yang mendukung Prioritas Nasional dalam penyediaan data dan peta status sumber daya hutan dan kawasan hutan. Ketersediaan dan kemutakhiran data dan peta tersebut serta keterbukaan aksesnya diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam prioritas nasional. Dukungan Direktorat IPSDH disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Dukungan Dit. IPSDH dalam Program Ditjen PKTL Tahun 2020 (Perubahan)

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH
Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Dtjen PKTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2020

Pada tahun 2020, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memiliki kegiatan, sasaran kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan Dan Elemen Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit Kegiatan	Target 2020	Elemen Kegiatan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	<i>Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional dalam rangka TSP/PSP</i>
					<i>Penghitungan Potensi SDH Nasional</i>
					<i>Penyusunan NSDH Nasional</i>
					<i>Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi</i>
					<i>Pembuatan Peta NSDH</i>
					<i>Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)</i>
					<i>Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH</i>

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit Kegiatan	Target 2020	Elemen Kegiatan
					<i>Perangkat Pengolah Data Pendukung Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional (ABT PNBK-PKH)</i>
			Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	<i>Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional</i> <i>Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional</i> <i>Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh</i> <i>Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan</i>
			Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	4 Judul	<i>Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia</i> <i>Penghitungan Deforestasi Indonesia</i> <i>Pemetaan Areal Indikatif Penghentian Pemberiaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</i> <i>Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan</i> <i>Penelaahan Peta Tematik Kehutanan</i> <i>Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan</i>
			Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4 Judul	<i>Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan</i> <i>Penyusunan Perdirjen/Permenhut Bidang Pemantauan Sumber Daya Hutan</i> <i>Penyusunan PermenLHK/Perdirjen PKTL tentang Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</i> <i>Penyempurnaan Peraturan P.28/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial lingkup KLHK</i>
			Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Dokumen	<i>Pengelolaan Basis Data Spasial LHK</i> <i>Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK</i> <i>Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</i> <i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Microlight Trike</i> <i>Peningkatan Jaringan Informasi Geospasial KLHK yang Terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (ABT PNBK-PKH)</i>

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit Kegiatan	Target 2020	Elemen Kegiatan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Operasional Perkantoran Direktorat IPSDH
			Layanan Umum	11 Layanan	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 adalah sebesar **Rp 4.215.383.000,-** (*Empat Milyar Dua Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), rincian biaya per- Unit Indikator tertuang pada Tabel 9.

Tabel 9. Rincian Biaya per Unit Kegiatan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Unit Kegiatan	Target	Jumlah Biaya
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status SDH Dan Kawasan Hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	675.990.000
		Penyusunan Data Pemantauan SDH	1 Dokumen	564.412.000
		Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	4 Judul	557.855.000
		Penyusunan NSPK Bid. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	4 Judul	230.330.000
		Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Dokumen	1.438.304.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	Operasional Perkantoran Direktorat IPSDH	1 Layanan	480.185.000
	Layanan Umum	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	268.342.000
Jumlah				4.215.383.000

BAB IV

PENUTUP

Alokasi anggaran DIPA Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020 telah mengalami perubahan terkait penghematan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Perubahan DIPA tersebut mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dokumen Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020.

Rencana Kerja (Revisi) ini menjadi acuan bagi seluruh Sub Direktorat dan Sub Bagian lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam menyusun rencana kerja selanjutnya.

Seluruh komponen dan sub komponen yang dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2020 berdasarkan kepada Elemen Kegiatan dan Indikator Kegiatan Kinerja Elemen Kegiatan (IKE) sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan alokasi anggaran untuk Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam pemanfaatan serta dapat mendukung pembangunan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

MATRIKS RINCIAN RENCANA KERJA (REVISI) TAHUN 2020
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target 2020	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Kegiatan Rinci
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Dokumen	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	Tersusun dan Tersedianya Data dan Peta Potensi SDH	Data dan Peta Potensi SDH	A Pengendalian Teknis Inventarisasi Hutan Nasional dalam rangka TSP/PSP C Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional D Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional E Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSDH Provinsi F Pembuatan Peta NSDH G Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH) H Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH I Perangkat Pengolah Data Pendukung Penghitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional (ABT PNPB-PKH)
			Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	Tersusun dan Tersedianya Data Pemantauan SDH	Data Pemantauan SDH	A Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional B Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional C Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh D Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan E Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia F Penghitungan Deforestasi Indonesia G Pemetaan Areal Indikatif Penghentian Pemberiaan Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut D Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan E Penelaahan Peta Tematik Kehutanan F Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumber Daya Hutan
			Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	4 Judul	Tersusun dan Tersedianya Data dan Peta Tematik Kehutanan	Data dan Peta Tematik Kehutanan	A Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan B Penyusunan Perdirjen/Permenhut Bidang Pemantauan SDH
			Penyusunan NSPK Bid. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	4 Judul	Tersedianya NSPK Bid. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	NSPK bidang Inventarisasi dan Pemantauan SDH	A Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan B Penyusunan Perdirjen/Permenhut Bidang Pemantauan SDH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target 2020	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Kegiatan Rinci
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Dokumen	Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	<p>C Penyusunan PermenLHK/Perdirjen PKTL tentang Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</p> <p>D Penyempurnaan Peraturan P.28/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial lingkup KLHK</p> <p>A Pengelolaan Basis Data Spasial LHK</p> <p>B Pengelolaan Jaringan Data Spasial LHK</p> <p>C Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta</p> <p>D Pengoperasian dan Pemeliharaan <i>Microlight Trike</i></p> <p>E Peningkatan Jaringan Informasi Geospasial KLHK yang Terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (ABT PNBP-PKH)</p>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Layanan Perkantoran		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat	A Operasional Perkantoran Direktorat IPSDH
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Dukungan Manajemen Direktorat	1 Layanan	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	<p>A Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran</p> <p>B Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>C Pengelolaan Kepegawaian</p> <p>D Koordinasi terkait Ketatausahaan Direktorat</p>

